

## DISEMINASI PROSES PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI MEDIA

Andi Haris\*

**Jurusan Sosiologi Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea  
Makassar 90245, Indonesia**

### ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian pustaka yang dikomunikasikan dengan pengamatan langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengkaji lebih mendalam tentang proses pengelolaan pembangunan masyarakat desa. Sebagaimana diketahui bahwa membangun masyarakat desa dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di desa serta menggunakan berbagai strategi pembangunan di nilai merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan agar masyarakat desa dapat berkembang menjadi suatu komunitas yang maju sehingga hal ini akan berdampak pada pencapaian tujuan nasional.

Sementara itu, informasi tentang masyarakat desa tidak hanya dapat diperoleh melalui media cetak baik itu dalam bentuk buku, majalah, surat kabar maupun jurnal tapi juga informasi tentang perkembangan masyarakat desa ini dapat pula diperoleh melalui media elektronik misalnya komputer yang mana lewat komputer tersebut dapat menyajikan banyak informasi tentang desa khususnya yang diakses melalui internet. Apalagi, dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat sehingga tidak mengherankan apabila media tersebut banyak menyajikan tentang beragam informasi termasuk masyarakat desa.

Masyarakat desa merupakan sebuah wilayah yang memiliki sistem sosial dan nilai budaya yang relatif berbeda dengan masyarakat perkotaan terutama kota metropolitan. Terlebih lagi, masyarakat desa selain luas wilayahnya termasuk sempit juga fasilitas serta sarana yang amat terbatas oleh karena itu melalui pembangunan desa, di harapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beragam bentuknya dapat tercapai.

**Kata kunci:** Diseminasi informasi, Pembangunan masyarakat desa

### ABSRTACT

This article was based on the library research in order to obtain complete information that relate to the process of rural development. As we know that rural development can be performed by using all of the natural resources and other new strategy for development so that we can accelerate the development process in the rural areas. Thus, the main goal of national development is going to be achieved. In the mean time, the information of rural development can also be obtained not only from the books, newspapers, magazines and scientific journals but also other electronic media such as computer and internet. Moreover, the progress of the technology of the communication in which it provides a lot of data in relation to rural development.

Rural areas consist of the varieties of the social system that differ from urban areas either in the sense of values, habits, customs or human behaviour especially for the metropolitan city. Apart from that, rural areas also have small space compared with urban areas. Because it has restricted facilities and therefore through rural development, the varieties of the basic needs of the people will be fulfilled

**Key Words :** Dissemination information, Development villagers

### **1. PEMANFAATAN MEDIA DAN SUMBER INFORMASI**

Melalui perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berlangsung begitu

sendirinya akan menciptakan perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Begitu juga halnya dengan informasi yang diperlukan yang terkait dengan masalah pembangunan desa yang mana informasi ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan media apakah itu berupa media cetak seperti surat kabar, majalah, jurnal ilmiah maupun yang telah ditulis dalam bentuk buku ataukah informasi yang diperoleh dari sumber lain misalnya melalui internet dengan menggunakan

\* Penulis koresponden  
alamat e-mail: [aharis@yahoo.com](mailto:aharis@yahoo.com)

komputer yang mana pemanfaatan media seperti ini memainkan peran yang sangat penting dalam memperluas pengetahuan serta wawasan bagi setiap orang yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai dinamika dan strategi pembangunan masyarakat desa.

Untuk penggunaan teknologi komputer misalnya dimana manusia dapat mengakses banyak informasi lewat internet yang tidak hanya menyajikan setumpuk data sekunder yang relevan dengan asal usul, tipologi serta potensi desa tapi juga melalui media tersebut dapat menyajikan banyak informasi yang di tampilkan dalam bentuk foto tentang beragam tipe desa yang ada di berbagai negara di samping itu kaum peneliti, akademisi, praktisi pemerintahan, aktivis, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa dan kelompok dari kalangan umum dapat pula melakukan komunikasi serta membangun jaringan dengan instansi yang terkait guna memperoleh informasi yang lebih jauh tentang desa dengan segala macam cara pengelolaannya.

Selain itu, pemanfaatan berbagai dokumen dan sumber lain yang tersimpan di perpustakaan dapat pula merupakan salah satu media yang sangat penting dan bias di manfaatkan oleh mereka yang memiliki minat serta perhatian besar bagi pengelolaan masyarakat desa. Apalagi, dengan semakin kompleksnya sumber data yang tersimpan di perpustakaan sehingga hal ini lebih memudahkan bagi mereka yang ingin menggali informasi lebih mendalam, akurat serta cepat tentang proses pembangunan masyarakat desa dengan segala aspeknya termasuk sumber daya manusia yang mengelolanya dan sumber daya alam yang terdapat pada desa tersebut.

## 2. PENDAHULUAN

Munculnya program pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan untuk lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adalah merupakan suatu tuntutan pembangunan yang mau tidak mau harus dilaksanakan, apalagi dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terutama yang bermukim di daerah pedesaan yang mana semua ini dimaksudkan agar supaya kesejahteraan masyarakat lebih ditingkatkan dan dapat dinikmati pada semua lapisan masyarakat terutama bagi mereka yang tergolong tertinggal yang hidup di daerah pedesaan.

Hal lain yang paling dihadapi oleh masyarakat pedesaan adalah masalah bagaimana menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan sehingga mereka dapat hidup lebih sejahtera dan

makmur seperti halnya dengan sebagian masyarakat yang hidup di daerah perkotaan. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi masalah ini pemerintah telah menetapkan suatu inpres nomor 5 Tahun 1993 yang dimaksudkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan pada desa yang dianggap tergolong tertinggal (IDT).

Adanya dana yang diberikan kepada desa pada waktu itu yang dianggap sebagai desa tertinggal merupakan suatu langkah maju untuk meningkatkan beragam kegiatan pembangunan pada desa tersebut mengingat pada desa yang termasuk tertinggal menghadapi beberapa permasalahan seperti : pendapatan yang rendah, adanya kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kurangnya lapangan kerja yang memadai serta minimnya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adapun dana yang dicairkan pada program Inpres Desa Tertinggal kala itu yaitu sebesar Rp 60 juta yang dilakukan secara bertahap untuk tiga tahun anggaran yang masing-masing sebesar Rp 20 juta untuk setiap tahunnya. Pengendalian serta pengawasan dana itu sendiri sepenuhnya berada pada Bupati dan Walikota yang mana pemantauannya dilakukan oleh para camat, lurah dan LKMD.

Pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) itu adalah merupakan salah satu strategi untuk membangun masyarakat desa selain beberapa strategi untuk membangun masyarakat desa lainnya misalnya strategi yang berorientasi pada kebutuhan dasar yang secara langsung dapat menanggulangi masalah kebutuhan akan makanan yang bergizi, kesehatan, pendidikan, pakaian, perumahan dan kesempatan kerja. Adapun strategi pembangunan yang berorientasi dari dalam masyarakat desa adalah dimaksudkan untuk lebih menciptakan kemandirian masyarakat desa tersebut sehingga dapat mengembangkan dirinya melalui kegiatan keswadayaan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan suatu tipologi desa yang mampu berdiri sendiri.

Sedangkan keseluruhan strategi pembangunan masyarakat desa harus pula mencakup beberapa aspek yang penting diantaranya adanya kemudahan mencapai tujuan yang diinginkan. Agar supaya setiap kegiatan dapat tercapai tujuannya dengan mudah, maka faktor kemampuan masyarakat harus pula diperhitungkan. Hal ini meliputi nilai potensi yang dimiliki oleh desa baik secara fisik maupun non fisik. Selain itu, masalah biaya dan guna hasil suatu kegiatan perlu mendapat perhatian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan masyarakat desa miskin atau tertinggal.

### **3.MEMAKNAI PEMBANGUNAN**

#### **a.Pengertian**

Arti dari suatu modal pembangunan biasanya diorientasikan sebagai pedoman atau petunjuk yang dapat dipergunakan oleh para perencana pembangunan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan pengertian pembangunan hingga sekarang ini ternyata masih menimbulkan berbagai pendapat misalnya : Phillips Roupp (1953) menjelaskan bahwa pembangunan adalah perubahan dari sesuatu yang kurang berarti pada sesuatu yang lebih berarti, kemudian Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, AR (1980) mengartikan pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Sementara itu, Everett M Rogers (1985) pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Dengan demikian, maka secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya masyarakat serta program yang telah direncanakan sebelumnya.

#### **b.Pembangunan Desa**

Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat pedesaan, strategi sebagai pedoman dan arah suatu kebijaksanaan pembangunan harus mencakup beberapa hal yang penting yaitu :

1. Tujuan yang jelas yang ingin dicapai dalam pembangunan masyarakat desa.
2. Model pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
3. Kondisi dan potensi yang ada pada masyarakat termasuk didalamnya masalah faktor geografis, lingkungan sosial budaya masyarakat desa.
4. Adanya kemungkinan muncul berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan di pedesaan.

Pada dasarnya, tujuan pembangunan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup serta mengentaskan kemiskinan masyarakat desa dari kemiskinan dan keterbelakangan dengan memperhitungkan segala kemampuan baik yang sifatnya materil maupun non materil. Kemampuan itu ada pada setiap perencanaan dan pelaku pembangunan serta juga pada masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pembangunan. Bagi desa yang dianggap miskin, maka tujuan yang paling

penting adalah masalah pemenuhan kebutuhan yang dianggap pokok dan mendasar misalnya:

1. Pemenuhan akan kebutuhan pangan atau nutrisi.
2. Pemenuhan akan kebutuhan pakaian.
3. Pemenuhan akan kebutuhan pendidikan.
4. Pemenuhan akan kebutuhan perumahan.
5. Pemenuhan akan kebutuhan kesehatan.
6. Pemenuhan akan kebutuhan sarana olahraga dan sebagainya.

Keseluruhan pemenuhan kebutuhan tersebut diatas memiliki arti yang penting bagi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan (Todaro, 1982:128) dalam usaha untuk mencapai pemenuhan kebutuhan itu, harus pula didukung oleh berbagai pendekatan yang cocok dan berorientasi pada kepentingan orang banyak terutama bagi mereka yang hidup serba kekurangan dan ketidak beruntungan. Beberapa pendekatan yang dimaksud seperti pendekatan yang berorientasi pada keagamaan, pendekatan yang berorientasi pada nilai budaya masyarakat setempat, pendekatan terhadap pada tokoh masyarakat serta pendekatan yang sifatnya persuasif dan partisipatif.

Disamping itu menurut moelyorto (1987) bahwa suatu strategi pembangunan perlu pula memahami secara mendalam kondisi serta faktor geografis masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat setiap masyarakat mempunyai lingkungan geografis dan nilai potensi yang berbeda-beda. Dengan belajar dari segala kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, akan membantu para perencana pembangunan untuk menciptakan suatu strategi yang tepat dan efektif untuk dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam mengintensifkan kegiatan pembangunan pada semua sektor sehingga sasaran pembangun dapat tercapai semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Kurangnya pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat dapat menjadi sumber munculnya berbagai kesulitan atau hambatan dalam menciptakan strategi yang dianggap tepat untuk diterapkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan suatu masyarakat.

Selanjutnya, tidak semua model strategi yang diciptakan dapat diterapkan untuk semua tipe masyarakat namun hanya pada strategi tertentu yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang bersangkutan. Hal ini seringkali terjadi mengingat adanya berbagai hambatan yang muncul dan dapat menjaga faktor pengganggu bagi program kegiatan pembangunan telah dibuat sebelumnya. Adapun

hambatan yang dimaksud seperti hambatan yang bersifat psikologis kultural, politis, ekonomi serta hambatan yang dapat disebabkan oleh faktor alam dan lingkungan fisik masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hambatan yang bersifat psikologis yang meliputi adanya ketakutan dari masyarakat untuk menerima inofasi yang berasal dari luar dan selain itu munculnya anggapan dalam alam pikiran masyarakat bahwa jika terjadi perubahan sosial hanya akan menciptakan resiko yang berdampak negatif bagi kehidupan mereka yang selama ini terpelihra dengan baik. Sementara itu, menurut Rogers dan Shoemaker bahwa hambatan yang bersifat kultural dapat dilihat dari penolakan masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif berpartisipasi pasif dalam berbagai bentuk kegiatan yang bersifat inovatif. Ketidak terlibatan mereka dapat disebabkan oleh karena mereka menganggap bahwa pembaharuan yang dibawah oleh para agen pembangunan sesungguhnya tidak sesuai dengan kepercayaan serta adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat secara turun temurun. Sedangkan hambatan politis muncul dapat disebabkan oleh adanya birograsi yang mempersulit serta dengan sengaja menghambat kegiatan yang ingin dilaksanakan secepat mungkin. Lalu untuk hambatan yang bersifat ekonomis biasanya disebabkan oleh terbatasnya dana yang dapat digunakan untuk membayar kegiatan tersebut dan akhirnya hambatan geografis dapat berupa letak masyarakat yang jauh terpencil dan terisolasi dari kehidupan daerah yang padat penduduknya.

### C.Perencanaan Pembangunan Desa

Untuk menetapkan suatu definisi yang berlaku secara umum tentang perencanaan terasa masih sulit untuk dirumuskan. Hal ini dirasakan mengingat banyaknya definisi mengenai perencanaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Misalnya saja Newman berpendapat bahwa perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Sementara itu, Louis A. Allen mengemukakan bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan ; sedangkan Koontz dan O'Donnel mengemukakan bahwa perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternatif dari pada tujuan-tujuan, kebijaksanaan, prosedur dan program.

Dari beberapa pengertian perencanaan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa suatu perencanaan paling tidak mencakup beberapa unsur yang penting seperti:

- a) Perencanaan harus mempunyai tujuan tertentu.
- b) Suatu perencanaan harus mempunyai rumusan yang sifatnya sistematis dan terarah.
- c) Perencanaan dapat mencakup berbagai program kegiatan dan kebijaksanaan kegiatan.
- d) Perencanaan meliputi pula prosedur terhadap alokasi sumber daya yang ada

Apabila dilihat dari fungsinya, suatu perencanaan pembangunan dapat berfungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan dapat berfungsi sebagai pedoman atau alat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pada semua sektor kehidupan masyarakat.
- b) Perencanaan dapat pula berfungsi sebagai alat penentuan alternatif pemecahan masalah dalam pembangunan.
- c) Perencanaan dapat digunakan dalam menentukan skala prioritas untuk menentukan kegiatan mana yang dapat diprioritaskan dikerjakan serta kegiatan mana yang kemudian akan dikerjakan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam membuat perencanaan termasuk perencanaan pembangunan desa harus jelas dan tepat sesuai dengan jenis atau tipe perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya dalam perencanaan sektoral, yang mana tiap-tiap sektor seperti pertanian, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya masing-masing mempunyai sasaran dan tujuan dengan jelas. Hal itu dimaksudkan agar supaya target yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan dapat tercapai secara optimal, efisien dan efektif.

Disamping itu, dengan adanya perencanaan yang baik, maka semua masalah dapat diidentifikasi dan dapat dicari cara pemecahannya. Oleh karena perencanaan dapat mencakup berbagai program yang akan dilaksanakan, dengan demikian akan dapat diperoleh gambaran dan jenis pekerjaan dengan jelas sesuai dengan skala prioritas. Disamping itu, perencanaan dapat pula dijadikan sebagai alat yang dapat memprediksi berbagai kegiatan yang dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Itulah sebabnya, begitu besar manfaat adanya perencanaan tersebut sehingga dapat



membuat perencanaan sesuai dengan waktu yang diinginkan seperti perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Oleh sebab itu, suatu kegiatan pembangunan masyarakat desa yang dilakukan dengan tanpa perencanaan yang baik dan tepat hanya akan dapat menimbulkan berbagai masalah yang tidak hanya banyak menghabiskan waktu dan tenaga akan tetapi juga biaya pembangunan.

Oleh karena itu, suatu perencanaan pembangunan desa yang baik paling tidak mempunyai beberapa ciri sebagai berikut :

- a) Rencana yang dibuat sebaiknya dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dan profesional pada masing-masing bidangnya. Artinya bahwa selain mereka menguasai teori dan teknik perencanaan. Juga dituntut adanya keterampilan serta pengalaman dalam membuat perencanaan pembangunan. Semua ini dilakukan agar supaya perencanaan tersebut tidak dapat diragukan lagi baik dari segi teori, metode maupun teknik yang tepat dan akurat sehingga dapat memberikan hasil yang efektif dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b) Rencana yang dibuat sebaiknya mudah dan sederhana. Artinya bahwa rencana tersebut hendaknya mudah dipahami oleh semua orang dan dapat diterapkan secara langsung dalam praktek sehingga setiap orang dapat memahami secara logis hakekat dan maksud daripada tujuan perencanaan tersebut.
- c) Perencanaan pembangunan desa hendaknya tidak bersifat kaku. Artinya bahwa dalam perencanaan itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dimana rencana tersebut akan diterapkan. Ini disebabkan karena dalam beberapa hal, perencanaan yang bersifat kaku dan tidak fleksibel hanya akan dapat memerlukan banyak biaya pembangunan yang pada akhirnya hanya akan memboroskan biaya serta menciptakan keraguan serta ketidakpastian bagi masyarakat.
- d) Dari segi ekonomi dan politik, perencanaan sebaiknya menyentuh seluruh kepentingan dan keinginan masyarakat. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pembangunan bagi semua lapisan social.

#### 4.PENGERTIAN DESA

Dalam buku yang ditulis oleh R. Soeparmo (1977) Istilah desa diambil dari bahasa Sangsakerta

yang berarti “tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran”.Namun dalam perkembangan selanjutnya perkataan desa itu sendiri telah mengalami berbagai jenis perubahan yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing jenis daerah atau wilayah. Sebagai contoh di Sumatera Selatan orang menyebutnya dengan nama “Dusun”, atau “Pendopo” atau Marga. Sementara itu di Sumatera Barat yang menyebutnya “Negeri”. Di Aceh orang menyebutnya “Gamping” atau “*Maunasah*”, di daerah Minahasa orang menyebutnya “Wanua” Adapun yang dijelaskan bahwa Lampung disebut “dusun” sedangkan di Tapanuli disebut “Huta atau Kuta”. Lalu di daerah Minangkabau disebut “Negeri” dan lain sebagainya.

Selain itu, definisi tentang desa juga kadang masih berbeda-beda sesuai dengan yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

1. Soetardjo Kartohadikusumo (1977) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah suatu daerah kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri.
2. R. Bintarto (1984) berpendapat bahwa desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, ekonomis, politis dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
3. P. J. Bouman (1977) berpendapat bahwa desa adalah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah social.
4. Dalam peraturan pemerintah RI No.72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara kesatuan republik Indonesia.

Dari beberapa pengertian tentang desa tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu desa mempunyai beberapa unsure diantaranya seperti: a) harus ada pola kehidupan yang meliputi interaksi sosial dan corak hidup masyarakat desa. Apabila dilihat dari jumlah penduduk, maka menurut pendapat Brunner bahwa suatu desa mempunyai jumlah penduduk antara 250 hingga 2500 orang. Sedangkan pola dan karakteristik kehidupan masyarakat desa sangat berbeda dengan masyarakat perkotaan. Secara umum dapat dijelaskan bahwa salah satu ciri khas suatu desa meliputi:

- a. Luas wilayahnya lebih sempit jika dibandingkan dengan kota.
- b. Jumlah penduduknya relatif lebih sedikit.
- c. Penduduknya pada umumnya lebih bersifat homogen atau cenderung mempunyai budaya, kepercayaan, adat-istiadat, agama, suku, pekerjaan yang sama.
- d. Hubungan dan interaksi sosial yang berlangsung diantaranya para penduduk lebih akrab dan mempunyai solidaritas sosial yang kuat.
- e. Mempunyai jiwa gotong royong yang kuat dan semangat gotong royong ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas di daerah pedesaan, terutama dalam membangun rumah yang baru, mengelolah sawah pada daerah pertanian, tolong menolong dalam melakukan kegiatan dan upacara keagamaan. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika penduduk desa tidak berorientasi pada sifat individualistic serta materialistis akan tetapi lebih berorientasi pada semangat dan jiwa kebersamaan dan kekeluargaan yang secara terus menerus merekaelihara dan lestarikan.
- f. Musyawarah dan mufakat. Dalam memecahkan setiap persoalan yang muncul, penduduk desa dapat memecahkan masalah mereka dengan melibatkan para tokoh masyarakat serta para orang tua yang dianggap mempunyai pengalaman yang banyak melalui suatu musyawarah yang penuh jiwa kebersamaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Untuk melaksanakan kegiatan itu dapat dilakukan di rumah para kepala desa dan dibalai pertemuan desa.

## 5. Potensi Masyarakat Pedesaan

Desa bukan hanya merupakan tempat tinggal, bagi sejumlah penduduk, akan tetapi lebih dari ternyata desa juga mempunyai berbagai fungsi yang penting artinya terutama bagi daerah perkotaan. Beberapa fungsi yang dimaksud adalah :*Pertama*, bahwa desa mempunyai fungsi ekonomi bagi wilayah perkotaan. Dalam hal ini, desa yang kaya akan berbagai jenis hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan dapat menjadi bahan baku serta bahan mentah yang setiap saat dapat dikirim ke kota untuk diolah dan selanjutnya dapat diproduksi dalam bentuk aneka ragam jenis makanan yang dapat dikonsumsi bagi masyarakat perkotaan. Di Negara agraris yang mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian, peranan desa sangat penting bagi sumber penyediaan bahan mentah seperti buah-buahan, padi-padian serta sayur-sayuran.*Kedua*, desa yang mayoritas penduduknya mempunyai pekerjaan pada sektor pertanian dapat menjadi tenaga kerja yang produktif apabila mereka diberi berbagai keterampilan dan keahlian dalam bidang jasa dan industri untuk dapat bekerja di daerah perkotaan. Dan *Ketiga*, desa dapat menjadi faktor pendukung bagi pemekaran dan perkembangan suatu kota apabila arus transportasi serta komunikasi semakin lancar.

Adapun nilai potensi desa pada garis besarnya dapat diklasifikasikan kedalam dua bagian penting, yaitu : a). Nilai potensi fisik/alam dan b). Nilai potensi non fisik/sosial. Nilai potensi fisik meliputi seperti : tanah, air, iklim dan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sementara itu nilai potensi yang bersifat non fisik meliputi nilai budaya dan perilaku yang dapat menunjang kegiatan pembangunan masyarakat.

Tanah yang subur serta didukung oleh persediaan air yang cukup merupakan potensi yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini dimaksudkan sebagai tempat bagi penanaman tanaman untuk sektor pertanian dan perkebunan. Bagi desa pantai, maka potensi yang sangat menonjol adalah tersedianya sumber protein hewani seperti aneka ragam hewan yang hidup di laut yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, harus pula didukung oleh iklim yang cocok sesuai dengan tipe desa. Misalnya untuk desa pertanian diperlukan adanya perubahan musim yang berlangsung secara teratur bagi tumbuhnya tanaman dan untuk kelancaran penyediaan air yang diperlukan oleh para petani. Demikian pula dengan halnya tenaga kerja sebagai salah satu nilai potensi desa yang dapat menunjang berbagai kegiatan di pedesaan. Adanya tenaga kerja yang terampil dalam mengelola sumber daya alam baik hayati

maupun hewani akan dapat meningkatkan produksi pertanian dan peternakan serta perikanan bagi suatu desa. Dengan meningkatnya produksi tersebut berarti hal itu dapat pula meningkatkan pendapatan perkapital masyarakat dan juga dapat mempercepat perkembangan desa menjadi suatu desa yang mandiri.

Aspek non fisik merupakan faktor penting bagi perkembangan suatu desa. Umpamanya adanya semangat, motivasi serta jiwa kerja sama yang kompak, gotong royong bagi semua kegiatan yang bersifat membangun desa senantiasa dipelihara oleh masyarakat desa secara turun temurun. Keterlibatan warga desa yang kadang-kadang bersifat tanpa pamrih adalah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang memiliki nilai budaya yang tinggi. Demikian juga halnya dengan peranan lembaga sosial yang ada di desa seperti lembaga sosial desa dan lembaga ketahanan masyarakat desa serta lembaga musyawarah desa yang mana kesemuanya itu dibentuk dalam rangka menggalang warga desa untuk berpartisipasi aktif bagi pembangunan desa.

Selanjutnya, peranan para kepala desa dan kepala dusun serta para pengurus organisasi pemerintahan desa sangat diperlukan dalam menggerakkan serta membangkitkan motivasi bagi warga masyarakat dalam berbagi kegiatan yang dijiwai oleh semangat gotong royong yang tinggi. Begitu pentingnya peranan para pemuka dan tokoh masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan para warga masyarakat meminta petunjuk dan pengarahan agar supaya apa yang mereka lakukan sesuai dengan tujuan dan kepentingan desa secara keseluruhan dimana mereka berada.

## 6. Tipologi Masyarakat Desa

Walaupun setiap masyarakat memiliki tipologi masyarakat desa yang berbeda satu sama lain, namun setidaknya secara umum dapat digambarkan beberapa tipe masyarakat desa yang diantaranya:

### a. Desa Tradisional (Pra Desa)

Adapun tipe desa semacam ini kebanyakan kita jumpai pada komunitas adat terpencil yang mana seluruh kehidupan masyarakatnya, termasuk teknologi bercocok tanam, memelihara kesehatan, cara memasak makanan dan sebagainya masih sangat tergantung pada pemberian alam sekeliling mereka. Begitu juga dengan pembagian kerja di antara sesama mereka yang lebih menonjol ialah pembagian kerja berlandaskan jenis kelamin, maksudnya ada pekerjaan tertentu yang

hanya boleh dikerjakan oleh wanita saja sementara bagi pria tidak, dan demikian sebaliknya.

### b. Desa Swadaya

Pada dasarnya desa seperti ini memiliki kondisi yang relatif statis tradisional, dalam arti masyarakatnya sangat tergantung pada ketrampilan dan kemampuan pimpinannya. Karena itu kehidupan masyarakatnya sangat tergantung pada sumber daya alam yang belum diolah dan dimanfaatkan secara baik.

### c. Desa Swakarya (Desa Peralihan)

Sementara itu, keadaan desa ini sudah mulai disentuh oleh berbagai hasil budaya, yang cirinya berupa adanya pembaharuan yang sudah mulai dirasakan oleh anggota masyarakat. Selanjutnya nilai demokrasi dalam pembangunan sudah mulai berkembang dalam arti keputusan sudah tidak lagi semata bergantung pada pimpinan saja. Sedangkan hasil karya dan jasa serta keterampilan mulai menjadi ukuran dalam penilaian di kalangan anggota masyarakat dan tidak di dasarkan pada faktor keturunan. Lalu mengenai mobilitas sosial, baik itu dalam dimensi vertikal maupun horizontal sudah mulai Nampak.

### d. Desa Swasembada

Dalam tipe desa seperti ini yang mana masyarakatnya telah maju, umpamanya sudah mengenal sistem pengelolaan pertanian dan teknologi ilmiah telah mulai digunakan, dan sering mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial. Disamping itu, tingkat partisipasi masyarakat telah meningkat, selain indikator penilaian masyarakat lebih di dasarkan pada prestasi serta kemampuan seseorang.

## REFERENSI

- [1] A.Lysen.1981. *Individu dan masyarakat* Bandung:PT Sumur Bandung
- [2] Anwas ,Oos.2013.*Pemberdayaan Masyarakat Di Era Globalisasi*.Bandung: Penerbit Alfabeta
- [3] A.Surjadi.1983.*Pembangunan Masyarakat Desa* Bandung:Penerbit Alumni
- [4] Beratha.I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- [5] C.S.T, Kansil.1988 *Desa Kita* Jakarta: Ghalia Indonesia

- [6] Chambers. Robert.1987.*Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*.Jakarta:LP3ES
- [7] G. Kartasaputra. Etal. 1986. *Desa dan Daerah*. Jakarta : Bina Aksara.
- [8] Hagul. Peter (eds). 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [9] HAW,Widjaja.2012.*OtonomiDesa*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- [10] Kasryno,Faisal.1985.*Dinamika Pembangunan Desa*.Jakarta:PT Gramedia
- [11] Khairuddin,2000. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- [12] Korten C,David.1984.*Pembangunan Yang Memikat Rakyat*.Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan
- [13] Leibo. Jefta (eds). 1986.*Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Andi Offset
- [14] Mansyur,Cholil.Tanpatahun *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*.Surabaya:Usaha Nasional
- [15] Maskun,Sumitro.1994.*Pembangunan MasyarakatDesa*.Yogyakarta:PT MediaWidya Mandala
- [16] Moeljarto,T.1987.*PolitikPembangunan*. Yogyakarta:PT Tiara Wacana
- [17] Mubivarto. 1994. *Keswadayaan Desa Tertinggal*. Yogyakarta : Aditya Media
- [18] N. Marbun. 1988. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- [19] Ndaraha.Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta : Bina Aksara.
- [20] P.J.Bouman.1980. *Ilmu masyarakat umum*.Jakarta:P.T.Pembangunan
- [21] R. Bintaro. 1984. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- [22] R. Soeparmo. 1977. *Mengenal Desa*. Jakarta : PT. Intermasa.
- [23] Sayogyo. 1985. *Sosiologi Pedesaan. Jilid I*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- [24] S.H.Sarundajang.1997.*Pemerintah Daerah Berbagai Negara*.Jakarta:Pustaka Sinar Harapan
- [25] Siagian.Sondang. 1985. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta :Gunung Agung.
- [26] Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- [27] Stepanek F. Yoseph. 1985. *Dinamika Pembangunan Pedesaan*. Jakarta : PT Gramedia.
- [28] Suaca, Wayan Gede. 2011. Budaya Demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa di bali.Dalam jurnal kajian bali volume 1 no 1.Denpasar
- [29] SugihenT,Bahreint.1996.*Sosiologi Pedesaan*. Jakarta.PT Raja Grafindo Persada
- [30] Surianingrat .Bayu 1985. *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*.Jakarta : Aksara Baru.
- [31] Surjadi. 1983. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung : Alumni.
- [32] TodaroP,Michael. 1983 *.Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Jilid 2)* .Jakarta:Ghalia Indonesia
- [33] W. Widjaya. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*.Jakarta : Rajawali Pers.
- [34] Yuli Rokhman,Ayla.2011.Kondisi sosial masyarakat pedesaan mojokerto dan Pasuruan.Dalam jurnal kodisi sosial masyarakat kota, pinggiran dan Pedesaan.Malang
- [35] Zahmariri.2008.Pengembangan masyarakat perspekti pemberdayaan dan Pembangunan.
- [36] \_\_\_\_\_, 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : Bumi Aksara.Dalam jurnal pengembangan masyarakat islam volume 4 no.4.Bandar Lampung
- [37] \_\_\_\_\_, 1984. *Sosiologi Pedesaan. Jilid 2*.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.